

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

TAHUN 2016 – 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS KETAHANAN PANGAN**

JL. RAYA TERUSAN SINDANG KM 3 INDRAMAYU
Telp/fax. (0234) 275424

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT senantiasa kita panjatkan karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen yang penting dalam Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Indramayu yaitu Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu 2016 – 2021 ini tersusun berkat partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu kami ucapkan banyak terima kasih.

Semoga Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu 2017 – 2021 ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua, amiiin.

Indramayu, 2016

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Indramayu



H. WARJO, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP.19590513 198211 1 001

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang | 1 |
| 2. Dasar Hukum Penyusunan | 2 |
| 3. Maksud dan Tujuan | 3 |
| 4. Sistematik Penulisan | 3 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN | 5 |
| 2.1 Tugas dan Fungsi | 5 |
| 2.2 Sumber Daya | 15 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan | 16 |
| 2.4 Tantang dan Penluang | 24 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN VISI DAN MISI SERTA TUGAS DAN FUNGSI | 29 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 9 |
| 3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 30 |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ³⁴ | |
| 3.4 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kaljian Lingkungan Hidup Strategis | 39 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 43 |
| BAB IV. TUJUAN dan SASARAN | 47 |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 47 |
| BAB. V. SRATEGI DAN KEBIJAKAN | 49 |

| | |
|--|----|
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 55 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 65 |
| BAB VIII. PENUTUP | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses peningkatan kualitas hidup masyarakat baik material maupun spiritual. Tujuan Pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Kabupaten Indramayu merupakan bagian yang terpenting dari pembangunan perekonomian masyarakat karena mayoritas masyarakat Kabupaten Indramayu bermata-pencaharian dari sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan, diperlukan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, oleh karena itu pengembangan ketahanan pangan dan sumber daya manusia mutlak perlu dilaksanakan dalam upaya meningkatkan gizi masyarakat dan SDM yang berkualitas.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Kinerja masing masing sub sistem tercermin dalam hal stabilitas pasokan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, serta pemanfaatan pangan (food utilization) termasuk pengaturan menu dan distribusi pangan dalam keluarga. Kinerja dari ketiga subsistem ketahanan pangan akan terlihat pada status gizi masyarakat, yang dapat dideteksi antara lain dari status gizi anak balita. Apabila salah satu atau lebih dari ketiga subsistem tidak berfungsi maka akan terjadi masalah kerawanan pangan yang akan berdampak pada peningkatan status gizi kurang/gizi buruk. Jika terjadi hal demikian dapat dikatakan negara/daerah tersebut belum mampu mewujudkan ketahanan pangan.

Komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan nasional, sesuai dengan tanggungjawab dan kemampuannya masing-masing. Masyarakat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nasional sedangkan pemerintah lebih berperan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pengaturan, fasilitasi dan advokasi.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan. Dalam perjalanan terdapat beberapa kendala yang memasak harus

mengadakan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 diantaranya adalah adanya Perda 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Indramayu sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu menyusun perubahan Renstra DKP Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2021 dengan berpedoman pada perubahan RPJMD Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021. Selanjutnya Renstra DKP yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja DKP yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

B. Landasan Hukum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, adalah untuk menyediakan suatu dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati Indramayu Tahun 2017 – 2021.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, adalah sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan, karena memuat program dan kegiatan tahun 2017 - 2021.
2. Menjadi acuan bagi seluruh pegawai DKP Kabupaten Indramayu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
3. Menjamin adanya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan
4. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2017 – 2021, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistimatiaka Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Adapun sistimatikanya, sesuai dengan Pasal 111, adalah sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah
- III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
- IV. Tujuan dan Sasaran
- V. Strategi dan arah kebijakan
- VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan
- VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan
- VIII. Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengeruainkan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN dan SASARAN

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD

BAB. V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang d alam RPJMD

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTAPENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif perangkat daerah tahun 2017 - 2021

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII. PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah dan rencana tindak lanjut

BAB II

GAMBRAN PELAYANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN (DKP)

KABUPATEN INDRAMAYU

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dasar Hukum dibentuk Dina Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu.

Adapun Tugas, Fungsi dan Sruktur Orginasaki sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut :

- a. Dinas mempunyai **tugas** membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, mempunyai **fungsi** :
 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
 2. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan;
 5. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari fungsi organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud), Kepala mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pangan;
- e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang pangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan UPT;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
- j. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Dinas;
- b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas;
- d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
- e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;
- f. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- k. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
- e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

- g. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud), Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- d. pembinaan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.a Kepala Seksi Ketersediaan Pangan

Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- e. penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- h. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.b Kepala Seksi Distribusi Pangan

Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi dan harga pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang distribusi dan harga pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- d. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- f. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- g. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- h. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- i. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- j. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan;
- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.c. Kepala Seksi Kerawanan Pangan

Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - f. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - g. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Daerah;
 - h. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - i. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - j. penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan;
 - k. penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- l. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

memberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pengoordinasian kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- d. pembinaan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- h. pelaksanaan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang konsumsi dan keamanan pangan; pelaksanaan pelayanan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.a. Kepala Seksi Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud), Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang konsumsi pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- d. penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- f. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- g. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- h. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- i. penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- j. penyiapan bahan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;

- k. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.b. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d. penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- f. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- h. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- i. penyiapan bahan kerjasama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- k. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- l. penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- m. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

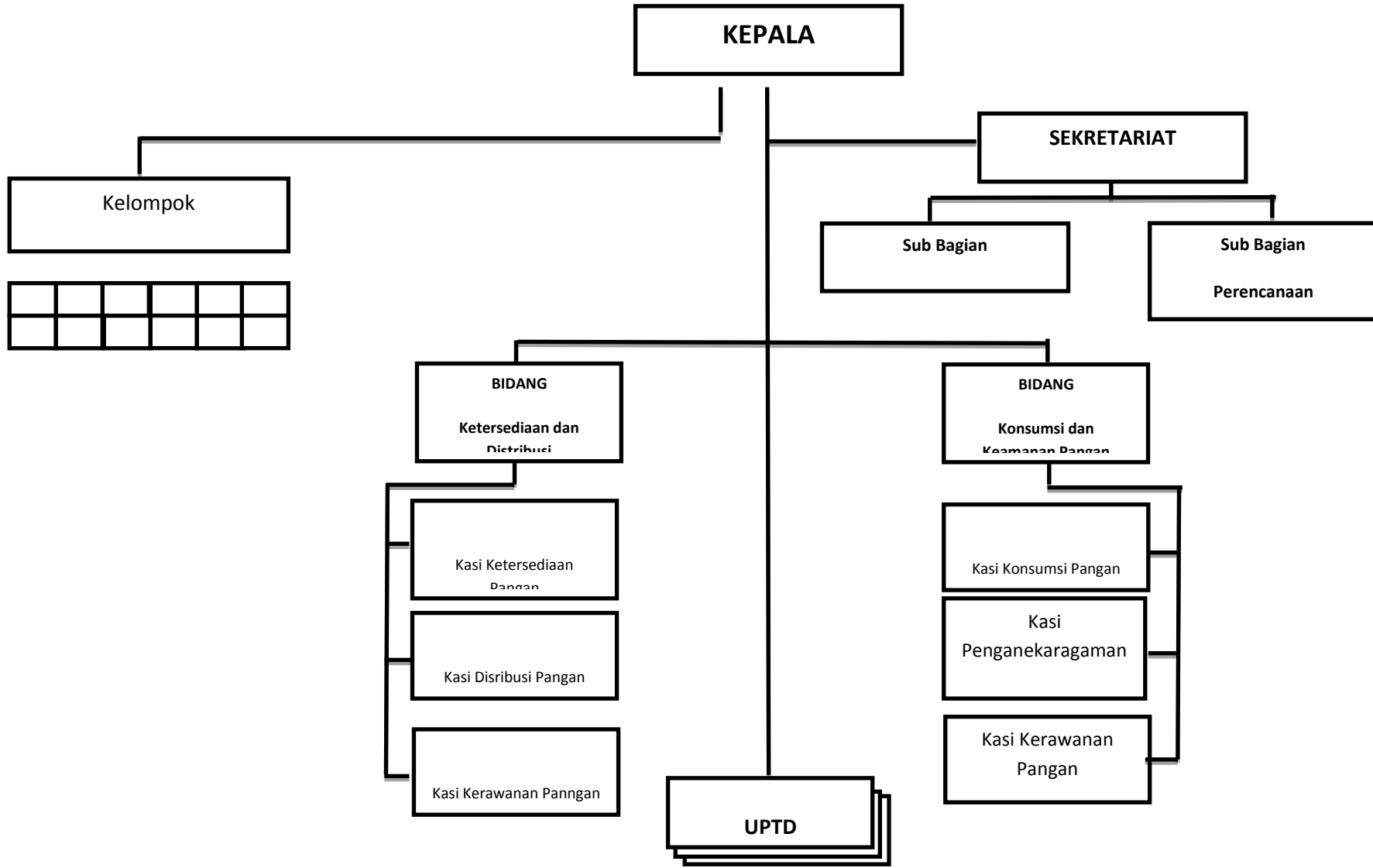
4.c. Kepala Seksi Keamanan Pangan

Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- g. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- h. menyiapkan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- i. menyiapkan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- j. menyiapkan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- k. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DKP KABUPATEN INDRAMAYU



2.2 SUMBER DAYA

A. Kondisi Umum Pegawai

Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu terdiri dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan staf fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terperinci, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dapat pada tabel berikut ini :

1.
Tabel 1. Kopolisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Status | Jumlah (Orang) | % |
|----|-----------|----------------|--------|
| 1 | Laki-Laki | 23 | 79,48 |
| 2 | Perempuan | 8 | 20,52 |
| | | | |
| | Jumlah | 31 | 100,00 |

Tabel 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan :

| NO | Pendidikan | Jumlah |
|----|-------------------|----------|
| 1 | Pasca Sarjan (S2) | 6 Orang |
| 2 | Sarjana (S1) | 10 Orang |
| 3 | Diploma (D3) | 2 Orang |
| 4 | SMA/SLTA | 10 Orang |
| 5 | SMP | 2 |

Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Gol:

| NO | Pangkat/Gol | Jumlah |
|----|-------------------------------------|--------|
| 1 | Pembina Utama Muda/IVc | 1 |
| 2 | Pembina Tk.I/IVb | 1 |
| 3 | Pembina /IVa | 4 |
| 4 | Penata Tk.I | 5 |
| 5 | Penata | |
| 6 | Penata Muda Tk.I | |
| 7 | Penata Muda | |
| 8 | Pengatur Tk. I (II/d)/Pengatur Muda | |

B. Sarana Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu telah dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Kabupaten Indramayu untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada, Tabel II.4 dibawah ini :

Tabel 4

Aset Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu

(Posisi Per Des 2018)

| NO | URAIAN | Jumlah (Unit) |
|----|--------------------------------|-------------------|
| 1 | Gedung DKP | 1Unit |
| 2 | Peralatan dan Mesin | |
| | a. Alat Angkut (Roda 4/2) | 12 |
| | b. Alat Dinas dan Rumah Tangga | 195 |
| | Total Nilai Asset per Des 2018 | 14.168.583.992,20 |

2.3

2.

KINERJA PELAYANAN

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu merupakan salah satu dinas yang mulai berdiri pada awal Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah; sebelumnya bergabung dengan urusan penyuluhan pertanian dengan nomenklatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu, sehingga tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, adapun target pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dari tahun sebelumnya dan setelah berdirinya dinas ketahanan pangan sebagai berikut :

Hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu menunjukkan keberhasilan pencapaian. Pada indikator ketersediaan pangan utama masyarakat (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, lemak dan minyak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur) dengan indikator kinerja tingkat ketersediaan energy dan protein perkapita dapat dilihat bahwa realisasi dari tahun ke tahun terus meningkat, peningkatan capaian indikator ini dipengaruhi oleh peningkatan hasil produksi dari komoditas pangan. Dengan pencapaian tersebut hendaknya pemerintah tetap menjaga peningkatan produksi komoditas pangan serta meningkatkan peran serta lembaga pangan desa dalam pengamanan ketersediaan pangan.

Pada indikator kinerja prosentase penguatan cadangan pangan pencapaian mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan. Cadangan pangan disini yang diukur hanya cadangan pangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dari stok cadangan pangan di gudang lumbung pangan kabupaten (tersimpan diBulog Indramayu). Realisasi sampai dengan dengan tahun 2018 masih lebih rendah apabila dibandingkan target yang ditentukan. Hal ini disebabkan stok cadangan pangan yang tersedia di gudang lumbung pangan kabupaten Indramayu belum memenuhi standar yang ditetapkan yaitu minimal 100 ton karena keterbatasan kemampuan anggaran dan ada pengurangan stok cadangan pangan pemerintah setiap tahunnya yang digunakan untuk bantuan kepada daerah yang terkena bencana alam, puso, rawan pangan serta masalah lainnya. Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut pemerintah daerah perlu menambah stok cadangan pangan pemerintah Kabupaten Indramayu.

Indikator prosentase stabilitas harga dan pasokan pangan, realisasi yang diperoleh telah sesuai target yang ditetapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Hal ini yang perlu terus dilakukan adalah dengan memantau dan meningkatkan stabilisasi harga dan pasokan pangan.

Indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi pada tahun ini telah melebihi target dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan target dan tahun-tahun sebelumnya, namun capaian kinerja tersebut belum mencapai angka PPH yang ideal Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat belum ideal yang ditunjukkan oleh konsumsi yang masih kurang untuk kelompok pangan sayur dan buah serta umbi-umbian kacang-kacangan, lemak/minyak, gula dan kelebihan konsumsi untuk kelompok pangan padi-padian . Antar daerah agroekologi mempunyai kesamaan pola keragaman konsumsi kelompok pangan.

Kelompok pangan penyumbang energi terbesar untuk Kabupaten Indramayu dan semua tipe agroekologi adalah padi-padian. Pola sumbangan energi dari kelompok pangan untuk Kabupaten Indramayu dan semua agroekologi adalah padi-padian > minyak dan lemak > kacang-kacangan > pangan hewani > sayuran dan buah > gula > kelompok

pangan lainnya = buah dan biji berlemak > umbi-umbian. Skor PPH untuk Kabupaten Indramayu tahun 2018 adalah 93,50% akan tetapi jika dibandingkan dengan skor PPH ideal yaitu sebesar 100% maka skor PPH Kabupaten Indramayu belum mencapai skor PPH yang ideal. Namun jika didasarkan pada skor PPH tingkat konsumsi dalam target Renstra Perangkat Daerah melebihi target yang ditetapkan (target 82% realisasi 93,50%). Skor PPH tingkat konsumsi di Kabupaten Indramayu dipengaruhi oleh tipe agroekologi. Skor PPH tertinggi terdapat pada tipe agroekologi pertaniannya yaitu 69,50% diikuti oleh agroekologi perikanan 24%.

Secara umum, konsumsi kelompok pangan yang berlebih untuk seluruh daerah groekologi adalah padi-padian . Kelompok pangan hewani mempunyai tingkat konsumsi yang hampir ideal. Kelompok pangan yang masih kurang dikonsumsi adalah umbi-umbian, lemak dan minyak, buah/biji berminyak, sayur dan buah, kacang-kacangan, dan gula. Pola konsumsi kelompok pangan antar tipe agroekologi di Kabupaten Indramayu hampir sama. Dengan demikian pengembangan pangan wilayah antar daerah agroekologi di Kabupaten Indramayu dapat diseragamkan. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan, sosialisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL) kepada masyarakat tentang sumber pangan alternatif yang berbasis sumber pangan lokal sehingga pola pangan masyarakat lebih beragam dan tidak tergantung pada beras.

Indikator Kinerja Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, capaian kinerja setiap tahunnya mencapai 100% berdasarkan target Renstra sampai dengan Tahun2018, namun apabila disandingkan pada target akhir Renstra perangkat daerah yaitu sebanyak 80 jenis sampel pangan segar dan sudah dilaksanakan uji sampel pangan segar sampai dengan akhir Renstra 2018 sebanyak 45 sampel pangan segar yang sudah di uji laboratorium yang aman dikonsumsi, sehingga rasio realisasi capaian kinerja sebesar 56,25% terhadap target akhir Renstra Perangkat Daerah (80 jenis sampel pangan segar baru terealisasi 45 jenis sampel pangan yang telah diuji laboratorium tambahan bahan makanan berbahaya) hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan terhadap target pelayanan uji laboratorium pangan segar sebesar 43,75 % terhadap target akhir Renstra Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Penangan Daerah Rawan Pangan, capaian kinerja setiap tahunnya adalah 100% (dari target sampai dengan Tahun 2018 adalah sebanyak 62 ibu hamil realisasi 62 ibu hamil) dengan kegiatan penanganan daerah rawan melalui Pemberian Tambahan Makanan (PMT) bagi ibu hamil didaerah rentan/rawan pangan, namun apabila disandingkan pada target akhir Renstra sebanyak 120 ibu hamil realisasi

sampai dengan tahun 2018 realisasi 62 ibu hamil atau capaian kinerja 51,66 %.. Dengan demikian capaian indikator penanganan daerah rawan pangan sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar 51,66 % dari target target akhir Renstra Perangkat Daerah , hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan terhadap target penanganan daerah rawan pangan sebesar 48,44 %.

Berdasarkan hal di atas, dalam perjalanan urusan pangan pada tahun 2017 terdapat perubahan SOTK dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu menjadi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu sesuai dengan Peraturan Bupati Indramayu No. 54 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu. Dengan demikian ada perubahan terkait bidang ketahanan pangan semula 1 (satu) bidang yaitu Bidang Ketahanan Pangan menjadi 2 (dua) bidang yaitu Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan dan Bidang Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan, guna adanya pembagian tugas yang menjadi tanggungjawab capaian kinerja dari masing-masing bidang maka perlu penambahan/perubahan program yaitu semula 1 (satu) Program Peningkatan Ketahanan Pangan menjadi 2 (dua) Program diantaranya adalah *(1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan dan Cadangan Pangan, (2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan.*

Maka untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu perlu melakukan upaya-upaya peningkatan ketahanan pangan melalui beberapa kegiatan strategis baik dalam bentuk pemberdayaan masyarakat (bersentuhan dengan masyarakat) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta analisis-analisis dalam rangka menghasilkan rumusan-rumusan dan kebijakan peningkatan ketahanan pangan baik dalam bentuk himbuan, edaran, keputusan dan peraturan.

2.3.1 Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan

Ketersediaan Pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber yaitu : produksi dalam negeri, pemasokan pangan, pengelolaan cadangan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan
2. Penyusunan dan Analisa Neraca Bahan Makanan (NBM) dan PPH

3. Penguatan Cadangan Pangan Daerah
4. Pembinaan Keberhasilan Ketahanan Pangan
5. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat

2.3.2. Distribusi dan Akses Pangan.

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan system distribusi yang efektif dan efisien, sbg prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan kualitas secara berkelanjutan, sangat sulit diwujudkan, mengingat masih ada sebagian masyarakat yang tidak mampu mengakses pangan yang cukup, penyebab utamanya adalah kemiskinan. Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dioperasionalkan melalui indicator ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan, dan indicator stabilisasi harga dan pasokan pangan. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pemantauan, Penyusunan dan Analisa Informasi Pasokan, Harga, Distribusi dan Akses Pangan
2. Penyusunan dan Analisa Pengembangan Cadangan Pangan
3. Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)
4. Toko Pangan Segar Indramayu (TPSI)

2.3.3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan

Pola Konsumsi Pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan Kabupaten Indramayu mutu, keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan. Juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan pada tubuh (food utility) dapat optimal dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energy, protein, vitamin dan mineral serta aman. Kegiatan yang akan dilaksanakan :

1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan
2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
4. Lomba Cipta Menu Berbasis Sumber Daya Lokal
5. Promosi/Diseminasi Ketahanan Pangan
6. Pengembangan Wawasan Keamanan Pangan

7. Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) Berbasis Sumberdaya Lokal.

2.3.4. Kerawanan Pangan

Kerawanan pangan adalah kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumahtangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana social (transien). Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dilakukan penanganan yang efektif dan efisien sesuai situasi dan kondisi yang ada, salah satunya dengan konsep Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Yaitu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan dan gizi melalui penyediaan data/informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.

Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Analisa Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
2. Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui Pemberian Tambahan Makanan (PMT) bagi Ibu Hamil di daerah rentan/rawan pangan.
3. Lumbung Pangan Masyarakat
4. Lembaga Dstribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Upaya pencapaian kinerja pelayanan DKP Kabupaten Indramayu dalam bentuk pembinaan ketahanan pangan tidak hanya ditempuh melalui program utama sebagaimana yang telah terurai sebelumnya, akan tetapi didukung pula melalui beberapa program penunjang, sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Administrasi Perdinasan;
- 2) Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur;
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur; dan
- 5) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten indramayu. Perlu dilakukan kajian atas situasi berdasarkan lingkungan eksternal dan internal yang dilakukan untuk merumuskan kebijakan ketahanan pangan berdasarkan isu strategis dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan ke depan sehingga ketahanan pangan masyarakat dapat terwujud di masa mendatang.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di kabupaten indramayu antara lain :

1. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku trigu/gandum.
2. Belum berkembangnya dengan baik diverifikasi produksi dan konsumsi pangan.
3. Masih terdapatnya KK rawan pangan pada desa/kelurahan tertentu yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
4. Adanya kecenderungan masyarakat makan makanan cepat saji.
5. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal) dalam hal ini karena kebiasaan sejak kecil.
6. Tidak adanya penyuluh/pendamping khusus ketahanan pangan dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
7. Masih tingginya peredaran pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan kabupaten indramayu adalah :

1. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
2. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

3. Ketersediaan lahan pertanian cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Ketersediaan bahan pangan lokal yang belum dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pangan alternatif.
5. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pematapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
6. Peran pemerintah yang konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

2.4.1. Hasil Analisis Renstra K/L dan Provinsi

Analisis terhadap renstra badan ketahanan pangan kementerian pertanian (2015 – 2019) dan badan ketahanan pangan provinsi Jawa Timur (2014 – 2019) ditunjukkan untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra dinas ketahanan pangan Kabupaten Indramayu.

Hasil review ini akan menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan dinas ketahanan pangan yang akan ditangani pada renstra dinas ketahanan pangan Kabupaten Indramayu. Adapun hasil analisis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Komparasi capaian sasaran renstra dinas ketahanan pangan kabupaten indramayu terhadap sasaran renstra K/L Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian Sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu | Sasaran pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat | Sasaran pada Renstra Kementerian Pertanian |
|-----|--|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Ketersediaan energi perkapita (SPM) | 5.000 Kilo Kalori/kapita/hari | Peningkatan produksi pangan berbasis kemandirian untuk mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 Kilo kalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gram/hari | Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.150 kilo kalori/hari |
| 2 | Ketersediaan protein per kapita (SPM) | 220 gr/kapita/hari | Peningkatan produksi pangan berbasis kemandirian untuk mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 Kilo kalori/hari dan penyediaan protein perkapita minimal 63 gram/hari | Ketersediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari; |
| 3 | Penguatan cadangan pangan pemerintah (SPM) | 100 ton | Ketersediaan cadangan pangan pemerintah untuk kondisi darurat karena bencana alam dengan cadangan minimal 3 bulan dan perkembangannya cadangan pangan masyarakat. | Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota, serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa. |

2.4.2 Hasil Analisis RTRW

Analisis terhadap rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten Indramayu bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan,. Hasil analisis yang diperoleh dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan arah dalam pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dalam kurun waktu lima tahun mendatang, Adapun hasil analisis terhadap RTRW dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu

| No. | Rencana Struktur Ruang | Struktur Ruang Saat ini | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan | Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan | Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan |
|-----|--|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Alih Fungsi Lahan | Terjadi alih fungsi lahan pertanian | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Berkurangnya luas lahan sawah dan perkebunan yang produktif berakibat menurunnya hasil produksi pertanian terutama tanaman pangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari 2. Pengembangan kelompok masyarakat mandiri pangan dengan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu luas 3. Pengembangan rumah tangga pengonsumsi pangan B2SA |
| 2 | Kawasan budidaya. Kawasan Pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari 2. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Berkaitan dengan ketersediaan pangan masyarakat yang memungkinkan untuk meningkatkan pola konsumsi pangan yang B2SA yang diindikasikan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan kawasan rumah pangan lestari 2. Pengembangan kelompok masyarakat mandiri pangan dengan pemanfaatan lahan yang tidak terlalu luas 3. Pengembangan rumah tangga pengonsumsi pangan B2SA |

1.4.3 Hasil Analisis Terhadap KHLS

Analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Dinas Ketahanan Pangan. Dari hasil analisis yang diperoleh, jika ternyata ada program dan kegiatan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut akan dilakukan revisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS, Adapun hasil analisis KHLS dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Indramayu

| No. | Ringkas KLHS | Implikasi terhadap Pelayanan SKPD | Catatan bagi perumusan Program dan Kegiatan SKPD |
|-----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pengembangan teknologi tepat guna pertanian dan perkebunan dalam meningkatkan kualitas pangan | Diperlukan bantuan /hibah teknologi tepat guna untuk menunjang peningkatan kualitas pangan | Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui kegiatan pengembangan Masyarakat Mandiri Pangan, kegiatan Fasilitas Mutu dan Keamanan Pangan |
| 2 | Penguatan mutu dan keamanan pangan masyarakat | Diperlukan sosialisasi dan fasilitasi untuk menunjang penguatan mutu dan keamanan pangan | Program Peningkatan Ketahanan Pangan kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan |
| 3 | Pemberdayaan masyarakat untuk ikut andil dalam penguatan pangan daerah melalui upaya pertanian dan perkebunan kecil mandiri | Diperlukan sosialisasi aplikasi teknis pemanfaatan tanaman pangan keluarga | Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang mengarah pada kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan serta kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan di daerah. Adapun pemetaan permasalahan yang akan dihadapi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rencana strategi 2016 – 2021 terkait pelayanan perangkat daerah, disusun ke dalam tabel berikut ini :

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan Perangkat Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none">a. Masih rendahnya produksi pangan lokal non beras (umbi-umbian, kacang-kacangan dll) sebagai sumber karbohidrat.b. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan pangan guna mengolah bahan pangan berbasis sumberdaya lokal.c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan cadangan pangan | <ul style="list-style-type: none">a. Kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.b. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian.c. Masih besarnya ketergantungan penyediaan pangan asal luar daerah (non beras). | <ul style="list-style-type: none">a. Ketersediaan Energi 2400 kkal /kapita/hari dan Protein 57 gram/kap/hari masih tergantung pada bahan pangan pokok beras dan bahan pangan impor/luar daerahb. Belum maksimalnya pengembangan cadangan pangan ditingkat masyarakatc. Belum optimalnya pemanfaatan lahan potensial seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan untuk penyediaan pangan sehingga masyarakat masih tergantung dengan pasar dan stok dari luar daerah. |
| 2 | Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, belum mencapai angka ideal (PPH 100%) | <ul style="list-style-type: none">a. Konsumsi beras perkapita masih tinggi.b. Belum optimalnya diversifikasi pangan/ percepatan peanekaragaman konsumsi pangan.c. Lemahnya promosi dan pelatihan olahan pangan berbasis sumberdaya lokald. Keterbatasan kemampuan megolah bahan pangan lokal | <ul style="list-style-type: none">a. Budaya masyarakat belum makan bila tidak makan nasib. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membudidayakan sumber bahan pangan alternatif yang berasal dari hasil pemanfaatan pekarangan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | <p>yang dimaniti masyarakat.</p> <p>e. Pengaruh globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis bahan impor.</p> | <p>pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumberdaya lokal.</p> <p>c. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman</p> <p>d. Masih banyaknya pangan segar yang belum terjamin mutu dan keamanannya yang beredar di masyarakat</p> |
|--|--|--|---|

Berdasarkan dari aspek kajian terbagi atas ketersediaan pangan, distribusi harga pangan, dan konsumsi dan keamanan pangan. Dimana dalam undang-undang ditegaskan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman bermutu dan bergizi, seimbang baik pada tingkat nasional maupun daerah perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

Permasalahan strategis yang dihadapi kondisi saat ini yaitu , Ketersediaan pangan untuk energi dan protein, Distribusi pangan dan Konsumsi pangan, adalah sebagai berikut :

a. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan dapat bersumber dari produksi pangan domestik dan atau pasokan pangan. Ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi dihitung berdasarkan penjumlahan produksi domestik, impor netto, perubahan stok dikurangi kebutuhan non konsumsi untuk benih, industri non pangan dan penggunaan lainnya. Berikut adalah permasalahan terkait ketersediaan pangan :

1. Ketersediaan energi sebagian besar masih berasal dari pangan nabati (didominasi beras), sedangkan sumbangan energi dari pangan hewani, umbian-umbian, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah dan lain-lain masih rendah.
2. Berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, penurunan kualitas dan kesuburan tanah akibat kerusakan lingkungan, air sebagai faktor pembatas, anomaly iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim, penerapan teknologi yang masih rendah dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan

3. Masih adanya rawan pangan karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar perdesaan, potensi sumber daya pangan yang rendah dan adanya bencana alam.
4. Pengelolaan lembaga cadangan pangan serta pemberdayaan lumbung pangan belum sepenuhnya optimal.
5. Pemanfaatan lahan potensial seperti lahan tidur, pekarangan rumah dan lahan di bawah tegakan hutan untuk penyediaan pangan belum optimal sehingga masyarakat masih tergantung dengan pasar dan stok dari luar daerah.
6. Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, serta keamanan pangan;

b. Distribusi Pangan

Kecenderungan peningkatan harga pangan akhir-akhir ini dapat menimbulkan gangguan kecukupan pangan dan gizi dan dapat mendorong timbulnya rawan gizi bahkan rawan pangan. Kelompok masyarakat dengan penghasilan terbatas akan mengurangi belanja bahan pangan terutama bahan pangan hewani sumber protein, yaitu daging, telur dan ikan. Permasalahan yang terkait dengan aspek distribusi pangan adalah :

1. Harga komoditas pertanian cenderung berfluktuasi, sehingga apabila terjadi kenaikan harga yang signifikan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.
2. Keterbatasan alokasi anggaran dan sumber daya aparatur (petugas lapangan), mengakibatkan sulitnya memantau arus keluar masuk bahan pangan.

c. Konsumsi Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagaimana masyarakat masih rendah yang ditandai dengan pola konsumsi pangan belum beragam, bergizi, berimbang dan aman. Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam upaya percepatan penganekaragaman konsumsi, yaitu :

1. Masyarakat secara umum masih ketergantungan pada beras dan terigu.
2. Pemanfaatan umbi-umbian serta pangan lokal lain sebagai sumber karbohidrat non beras masih rendah.
3. Masih kurangnya produksi pangan lokal non beras.
4. Konsumsi pangan hewani, umbian-umbian, kacang-kacangan, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, buah dan sayur dan lain-lain masih rendah.
5. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan, sehingga banyak dijumpai makanan yang mengandung pewarna, pengawet, dan bahan tambahan pangan lainnya yang tidak sesuai dosis anjuran.
6. Masih banyak komoditas pangan segar dan pangan olahan belum mempunyai SOP (standar operasional prosedur), sehingga belum menjamin keamanan untuk dikonsumsi.

d. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan ketahanan pangan maka penguatan kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan. Namun terdapat permasalahan yang dihadapi, antara lain :

1. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah dalam kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) semula sebagai lembaga koordinatif menjadi lembaga teknis dalam pengembangan ketahanan pangan di daerah.
2. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam merumuskan kebijakan bidang ketahanan pangan belum berjalan optimal.

3.2. Telaahan VISI dan MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021 adalah '**Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah**' (Indramayu Remaja Tiga) dengan pengertian sebagai berikut :

- **Religius**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya.
- **Maju**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan.
- **Mandiri**, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah.
- **Sejahtera**, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik.

Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan. Misi mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerah.

Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata kelola pemerintahan.

Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah : **Sapta Karya Mulih Harja** atau tujuh kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya, didiami oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. Misi ini tidak secara signifikan merubah dari Misi Sapta Karya Mulih Harja pada Periode sebelumnya, akan tetapi ada beberapa perubahan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;
2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;
3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;
4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;
6. Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan sesuai tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan memposisikan kontribusinya dengan fungsi yang menyertainya, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pangan
4. Pelaksanaan Administrasi di bidang pangan
5. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerja sama di bidang pangan.
6. Pelaksanaan pengelolaan UPTD
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas DKP terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke – 2 yaitu “**Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian**” Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian *tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah* dengan *sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan di Daerah* melalui ketersediaan pangan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal, tentunya dalam pencapaian misi kepala daerah terdapat permasalahan yang merupakan penghambat dan pendorong dalam pencapaian misi tersebut. Adapun factor penghambat dan factor pendor tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5
Faktor Penghambat dan Pendorong Peelayanan Perangkat Daerah
Dalam Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

| No | Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|--|--|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | <p>Misi : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian”</p> <p>Tujuan : Terwujudnya Ketahanan Pangan di Daerah</p> <p>Sasaran : Meningkatnya Ketahanan Pangan di Daerah</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingkat kualitas konsumsi masyarakat belum mencapai skor PPH ideal (100%) ➤ Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap beras. ➤ Tingginya tingkat ketergantungan akan produk impor pangan non beras. ➤ Belum optimalnya peningkatan produksi dan produktivitas non beras. ➤ Masih rendahnya sumber daya manusia bidang pangan. ➤ Tingginya persentase penduduk | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Budaya masyarakat yang menganggap”belum makan bila belum makan nasi” ➤ Rendahnya pengetahuan masyarakat akan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) berbasis pangan local. ➤ Belum maksimalnya tingkat koordinasidi internal dinas ataupun dean dinas lainnya teraik yang terintegrasi. ➤ Komptensi aparatur dinas yang menagani fungsi ketahanan pangan belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan ➤ Belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan/ keiskinan | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komitmen pimpinan daerah dalam peningkatan ketahanan pangan, khusus penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya local. ➤ Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. ➤ Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja inas Ketahanan Kabupaten Indramayu. |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|
| | | rawa pangan/kemiskinan | | ➤ Adanya Data Kemiskinan hasil PPLS. |
|--|--|------------------------|--|--------------------------------------|

3.3 Telaahan Rentstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1. Telaahan Rentstra Kementerian Pertanian Badan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI dengan sasaran strategis jangka menengah tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam,
2. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan,
3. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen,
4. Meningkatnya keragaman konsumsi yang sehat dan aman
5. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG)
6. Tercapainya keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi.

Berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi, maka target kinerja program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI tahun 2015-2019, dalam mencapai sasaran strategis tersebut terdapat permasalahan yang berkaitan penghambat dan pendorong dalam pelayanan perangkat daerah, dapat disajikan dalam tabel berikut ini : :

Tabel 6
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|---|---|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang beragam | masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal | Masih rendah kesadaran pelaku utama (petani) budidaya tanaman selain padi. | Adanya program peningkatan produksi pangan |
| 2 | Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan | masih tingginya presentase penduduk miskin/rawan pangan | belum teridentifikasinya penduduk miskin/rawan pangan | Adanya basis data terpadu kemiskinan |
| 3 | Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen | harga bahan pangan masih berfluktuatif | Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu | adanya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan |
| 4 | Meningkatnya keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman | masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman | Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal | Tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal |
| 5 | Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) | masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal | Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan | Adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 6 | Meningkatnya penanganan keamanan pangan segar melalui peningkatan peran produsen dan kepedulian konsumsi. | Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius dan masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan | Rendahnya kepedulian produsen dalam menghasilkan produk pangan yang aman | Telah dibentuknya Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah |
|---|---|--|--|--|

3.3.2. Telaahan Renstra Provinsi Jabar

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi Jawa Barat 2005-2025 yaitu **“Dengan Iman dan Taqwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**, dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Barat periode tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”** yang dibagi ke dalam 5 misi dimana tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan masuk kedalam misi 4 yaitu : **“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat Yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi Dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan”** dengan tujuan ke 7 (tujuh) yaitu **“Petani Juara”** fokus pada :

- A. Produktivitas petani ditingkatkan dengan menyalurkan berbagai bantuan kepada para petani berupa bantuan bibit, pupuk dan obat sasarannya adalah Petani di Jawa Barat.
- B. Irigasi Pertanian menjadi sumber penghidupan para petani, oleh karena itu akses yang mudah terhadap irigasi menjadi prioritas untuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian Jawa Barat sasarannya adalah : Pertanian di Jawa Barat.
- C. Gudang tani juara dengan pembangunan gudang di setiap kab/kota yang akan melindungi petani setempat dari resiko kerusakan hasil produksi serta mengendalikan harga komoditas tersebut sasarannya adalah Kab/Kota di Jawa Barat.

Secara umum tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan yang mendukung kedalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah **Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH) tingkat konsumsi dan Nilai Tukar Petani (NTP)**. Secara terperinci untuk mendukung kedua indikator kinerja daerah tersebut dituangkan kedalam Indikator Kinerja Program yang terdapat dalam RPJMD dan juga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Indikator kinerja rencana strategis dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Tujuan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu **meningkatkan konsumsi dan ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan** dengan sasarnya adalah **“meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi serta meningkatnya produksi dan daya saing produk”**. Adapun dalam mencapai sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat bidang pangan terdapat permasalahan yang menjadi penghambat dan pendorong dalam pelayanan perangkat daerah, sebagaimana dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu berdasarkan Sasaran Renstra Provinsi Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|---|--|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas pangan dan gizi | Masih tingginya tingkat kerawanan pangan/ kemiskinan di Jawa Barat. Masih rendahnya pemanfaatan sumber- sumber pangan lokal | Belum teridentifikasinya penduduk miskin/rawan pangan. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras. Budaya masyarakat yang menganggap "belum makan bila belum makan nasi" | Adanya program-program dan kegiatan lintas sectoral pusat dan daerah. Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sumberdaya local (Perbup 5 Tahun 20110) |

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strtegis

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dapat disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut :

Tabel

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 8

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| NO | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|--|---|--|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang | masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal | lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan | adanya program peningkatan produksi pangan |
| 2 | Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam | masih tingginya presentase penduduk rawan pangan | belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan | adanya basis data terpadu kemiskinan |
| 3 | belum optimalnya kawasan strategis | harga bahan pangan masih berfluktuatif | Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu | danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan |
| 4 | Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang | masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman | Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal | tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal |
| 5 | Keterbatasan infrastruktur wilayah | masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal | Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan | adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada masyarakat |
| | | Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius | Kinerja petugas belum optimal | pelatihan yang terintegrasi |

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah Dinas KetahananPangan ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari : 1) *Peningkatan alih fungsi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang*; 2) *Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah Rawan Bencana Alam*; 3) *belum optimalnya kawasan strategis*; 4) *Pertumbuhan Penduduk dan peningkatan produksi pangan tidak seimbang*; dan 5) *Keterbatasan infrastruktur wilayah*.

Peningkatan alih fungsi lahan pertanian panga produktif ke non pertanian dan ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang secara tidak langsung akan berpengaruh pada rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal. Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh secara tidak langsung terhadap rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan produksi pangan.

Implikasi RTRW tentang kondisi iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan banyaknya daerah rawan bencana alam, memberikan ancaman terkait belum optimalnya kawasan strategis dan keterbatasan infrastruktur wilayah yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan yaitu : *harga bahan pangan masih berfluktuatif, kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal dan keamanan pangan yang masih memerlukan penanganan serius*.

Dalam hal yang sama pula selanjutnya dilakukan hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel

Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Tabel 9

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Faktor | |
|-----|---|---|--|---|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Peningkatan konversi lahan pertanian pangan produktif ke non pertanian dan Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang | masih rendahnya produksi pangan pokok berbasis sumberdaya lokal | lemahnya koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan | adanya program peningkatan produksi pangan |
| 2 | Kondisi Iklim yang tidak stabil (anomali iklim) dan bencana alam dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen yang menimbulkan kondisi rawan pangan | masih tingginya presentase penduduk rawan pangan | belum teridentifikasinya penduduk rawan pangan | adanya basis data terpadu kemiskinan dari TNP2K |
| 3 | Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan pedesaan | harga bahan pangan masih berfluktuatif | Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu | danya program Peningkatan usaha ekonomi produktif di pedesaan |
| 4 | Perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan antara produksi pangan dan penduduk | masih rendahnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam bergizi, seimbang dan aman | Konsumsi pangan masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) dan Halal | tersedianya potensi keanekaragaman pangan lokal |
| 5 | Keterbatasan infrastruktur wilayah | masih kurangnya promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk | Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang diversifikasi pangan | adanya media informasi/saluran promosi dan edukasi kepada |

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|----------------|
| | | memanfaatkan pangan B2SA berbasis sumber daya lokal | | masyarakat |
| | | Keamanan Pangan masih memerlukan penanganan serius | Kinerja petugas belum optimal | pelatihan yang |

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategi

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD Dinas Pangan Kabupaten Indramayu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran Jangka Menengah dari Renstras SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHAS bagi pelayanan SKPD.

Metode penetapan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pangan Kabupaten Indramayu dilakukan dengan metode pembobotan dalam mengidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut :

- a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan seperti pada table berikut:

Tabel. 10

Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

| No | Kriteria | Bobot |
|----|---|-------|
| 1 | Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Rensrtra K/L atau Renstra Provinsi/Kota/Kabupaten | 20 |
| 2 | Merupakan Tugas dan Tanggungjawab SKPD | 10 |
| 3 | Dampak yang ditimbulkannya terhadap public | 20 |
| 4 | | 10 |

| | | |
|---|---|----|
| | Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah | |
| 5 | Kemungkinan atau mudah untu ditangani | 15 |
| 6 | Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan | 25 |

- b. Dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana pada table berikut :

Tabel. 11
 Nilai Skala Kriteria

| No | Isu Strategis | Nilai Skala ke- | | | | | | Total |
|----|--|-----------------|----|----|----|----|----|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah (pangan non beras) | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 85 |
| 2 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi belum mencapai angka ideal | 20 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 90 |
| 3 | Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan beras (126 kg/kapita/tahun) | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 85 |
| 4 | Masih rendahnya ketersediaan energy dan protein dari beberapa produk pangan (umbian-umbian, kacang-kacangan , hewani, buah dan sayur dll) | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 85 |
| 5 | Penyediaan pangan yang berkelanjutan melalui cadangan pangan pemerintah dan masyarakat | 20 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 75 |
| 6 | Tingginya persentase penduduk miskin (rentan pangan) | 20 | 10 | 20 | 10 | 5 | 10 | 80 |

| | | | | | | | | |
|---|---|----|----|----|----|----|----|-----------|
| | | | | | | | | |
| 7 | Merebaknya penyalahgunaan tambahan bahan makan kimia berbahaya untuk pangan | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 70 |
| 8 | Lemahnya koordinasi lintas sektoral | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 85 |

BAB. IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 VISI dan MISI

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, maka pernyataan **Visi Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021** adalah '***Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah***' (Indramayu Remaja Tiga)

Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata kelola pemerintahan.

Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu adalah : ***Sapta Karya Mulih Harja*** atau tujuh kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya, didiami oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. Misi ini tidak secara signifikan merubah dari Misi Sapta Karya Mulih Harja pada Periode sebelumnya, akan tetapi ada beberapa perubahan sebagai langkah penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi.

Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal;
2. **Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian;**
3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;

4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat;
6. Memperkuat Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat;
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Ditinjau dari sisi tugas pembinaan ketahanan pangan, secara umum tugas DKP terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus tugas dan fungsi yang menyertainya berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian **misi ke – 2** yaitu “**Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keresasian Industri Dan Pertanian**” Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui Terwujudnya Ketahanan Pangan dengan sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan melalui ketersediaan pangan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DKP

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Dinas Ketahanan Pangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Indramayu dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. **Adapun tujuan dan sasaran strategis** adalah :

Secara umum **tujuan** pembangunan ketahanan pangan adalah **Meningkatnya ketahanan pangan di daerah** dalam menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup , aman, bermutu, bergizi, berimbang secara merata dan

sepanjang waktu sampai ketinggian rumah tangga (perorangan). Dan hal ini akan terlaksana bila 3 (tiga) Sub Sistem Ketahanan Pangan berfungsi, yaitu :

- c. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
- d. Distribusi pangan yang lanacar dan merata, serta
- e. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi dan kaidah kesehatan dengan tidak melupakan keamanan pangan dan kehalalannya.

Untuk mencapai tujuan ***Meningkatnya ketahanan di daerah*** yang ingin dicapai dengan menetapkan sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya ketersediaan pangan di daerah.
2. Terwujudnya kualitas konsumsi pangan dan gizi

Untuk mencapai sasaran srategis terwujudnya ketersediaan pangan dan terwujudnya kualitas konsumsi pangan dan gizi, yang ingin dicapai Dinas Ketahanan Pangan didukung dengan sasaran program adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan cadangan pangan daerah pemerintah
2. Meningkatnya kualitas pangan dan gizi serta keamanan pangan.
3. Terwujudnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan.
4. Terwujudnya penanganan kerawanan pangan

Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah periode 2017–2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan ketahanan pangan jangka menengah Kabupaten Indramayu, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Indramayu secara keseluruhan. Tujuan terwujudnya kualitas ketahanan pangan masyarakat di daerah yang mengacu pada misi kedua yaitu “*Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian*”, dengan sasaran meningkatnya ketahanan pangan di daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Kabupaten Indramayu beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel. T-C.25

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2016 – 2021

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | TARGET | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|---|---|--------|--|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| Meningkatnya ketahanan pangan di daerah | Tingkat kecukupan konsumsi pangan berragam, bergizi, seimbang dan aman ditunjukan dengan skor pola pangan harapan (PPH) di Tahun 2021 | 85% | Meningkatnya ketahanan pangan di daerah serta mengoptimalkan Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | Persentase Skor pola pangan harapan (PPH) Tingkat Konsumsi | 80% | 81 % | 82 % | 83% | 84% | 85% |
| | | | | Ketersediaan informasi ketersediaan kecukupan energy dan protein | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Persentase penguatan | 61 % | 63 % | 67 % | 73 % | 78 % | 83 % |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Cadangan Pangan Daerah | | | | | | |
| | | | | Ketersediaan informasi stabilitas harga dan pasokan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Ketersediaan Informasi Pangan segar yang aman dikonsumsi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | | Ketersediaan informasi kerawanan pangan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan suatu strategi. Strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama lima tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strateg.

Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program, kegiatan dilakukan secara bertahap pertahun selama lima tahun.

A. Strategi

1. Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumber daya lahan air.
2. Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan.
3. Penguatan sisieim kelembagaan pangan dan melakukan stabilitas harga pangan pokok.
4. Melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dalam penyusunan kebijakan ketersediaan pangan.
6. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi melalui, sosialisasi dan promosi konsumsi pangan lokal (non beras dan terigu) yang bergizi, beragam, seimbang dan aman.
7. Mengembangkan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL)
8. Pemantapan gerakan Percepatan Penganekaragaman Komsumsi Pangan (P2KP) meallui pemberdayaan kelompok dasawisma (Kelompok ibu 10 KK)
9. Memantafkan pengawasan keamanan pangan segar

B. Kebijakan

Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu, mencakup sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam mewujudkan kualitas Ketahanan Pangan masyarakat

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu maka diperlukan kebijakan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Berkelanjutan.
2. Pengembangan kajian responship dan antisifatif ketersediaan pangan.
3. Penguatan dan Pemngembangan cadangan pangan pemerintah, lembaga pangan masyarakat dan pemantauan harga serta pasokan panan.
4. Deteksi dini dan intervensi terhadap wilayah rentan/rawan pangan
5. Peningkatan Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.
6. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi, yang merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pemanfaatan pekarangan pangan
8. Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal non beras dan terigu serta peningkatan jumlah informasi inovasi teknologi melalui media cetak dan elektronik
9. Peningkatan pengawasan mutu dan penyediaan pasilitas laboratorium keamanan pangan segar

Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat kita lihat pada Tabel ... dibawah ini :

Tabel. T-C.26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, dan Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah' (Indramayu Remaja Tiga) | | | | | | |
|---|---|---------|---------------------------------|----------|--|---|
| MISI Ke 2 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian” | | | | | | |
| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
| 1 | Meningkatnya ketahanan pangan di daerah | 1.1 | Terwujudnya ketersediaan pangan | 1.1.1 | Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumber daya lahan air | 1.1.1 Implementasi Peaturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Lahan Pertanian Berkelanjutan |
| | | | | 1.1.2 | Memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan | 1.1.2 Pengembangan kajian responship dan antisifatif ketersediaan pangan |
| | | | | 1.1.3 | Penguatan sisieim kelembagaan pangan dan melakukan stabilitas harga pangan pokok | 1.1.3 Penguatan dan Pemngembangan cadangan pangan pemerintah, lembaga pangan masyarakat dan pemantauan harga serta pasokan panan |
| | | | | 1.1.4 | Melakukan analisis dan program aksi penanganan wilayah rawan pangan. | 1.1.4 Deteksi dini dan intervensi terhadap wilayah rentan/rawan pangan |
| | | | | 1.1.5 | Meningkatkan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan dalam penyusunan kebijakan ketersediaan pangan | 1.1.5 Peningkatan Fasilitas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|---|-------|---|-------|---|
| | | 1.2 | Terwujudnya kualitas konsumsi pangan dan gizi | 1.2.1 | Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi melalui, sosialisasi dan promosi konsumsi pangan lokal (non beras dan terigu) yang bergizi, beragam, seimbang dan aman. | 1.2.1 | Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi, yang merupakan salah satu indikator kinerja keberhasilan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Indramayu 2016-2021 |
| | | | | 1.2.2 | Mengembangkan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui kawasan rumah pangan lestari (KRPL) | 1.2.2 | Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman melalui pemanfaatan pekarangan pangan |

| No | Tujuan | Sasaran | | Strategi | | Kebijakan |
|----|--------|---------|-------|--|-------|---|
| | | | 1.2.3 | Pemantapan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui pemberdayaan kelompok dasawisma (Kelompok ibu 10 KK) | 1.2.3 | Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal non beras dan terigu serta peningkatan jumlah informasi inovasi teknologi melalui media cetak dan elektronik |
| | | | 1.2.4 | Memantapkan pengawasan keamanan pangan segar | 1.2.4 | Peningkatan pengawasan mutu dan penyediaan fasilitas laboratorium keamanan pangan segar |
| | | | | | | |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Indramayu, maka langkah-langkah operasional dituangkan ke dalam program-program pembangunan ketahanan pangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu.

Kegiatan pembangunan ketahanan pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

5.1. Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu

- 5.1 Program Pendukung :
 - A Program Pelayanan Administrasi Perdinasan yang terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi
 - 1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya Air dan Listrik
 - 2. Penyediaan Alat Tulis Dinas Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4. Penyediaan Makan dan Minuman
 - 5. Rapat-rapat/Koordinasi/Konsultasi/Kunjungan ke Dalam dan ke Luar Daerah
 - B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :
 - 1. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Gedung Dinas
 - 2. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Dinas
 - 3. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasioal/Mobil Jabatan

4 Pemeliharaan Rutin Berklala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Dinas

C Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, meliputi :

1 Pengadaan Pakian Dinas dan beserta perlengkapannya

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang terdiri dari beberapa kegiatan, meliputi :

1 Pengumpulan Updating dan Analisis Data Informasi Program dan Kegiatan

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.2 Program Utama meliputi:

A. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan meliputi:

1 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

2 Penanganan Daerah Rawan Pangan

3 Pembinaan Keberhasilan ketahanan Pangan

4 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

5 Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat dan Harga Pangan Pokok

6 Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

7 Pendampingan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)

8 Lumbung Pangan Masyarakat

9 Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan

10 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pangan Masyarakat

11 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

- 12 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- 13 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan
- 14 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
- 15 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
- 16 Promosi dan Kampanye Ketahanan Pangan
- 17 Pengembangan wawasan Keamanan Pangan
- 18 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
- 19 Pembinaan dan Pelatihan Keamanan Pangan
- 20 Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Lokal
- 21 Sosialisasi Penganekaragam pangan Bergizi, Berimbang, Sehat dan Aman (B2SA).
- 22 Monitoring Lumbung Pangan Masyarakat

5.2 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Indikator Kinerja dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat ketersediaan
- b. Persentase penguatan cadangan pangan
- c. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

- a. Keluarga miskin dan perempuan kepala rumah tangga miskin
- b. Untuk kestabilan harga bahan pokok
- c. Para ibu – ibu Rumah Tangga/Tim Penggerak PKK
- d. Perubahan pola konsumsi pangan di masyarakat.
- e. Kelompok Lumbung Pangan dan Gapoktan/Poktan

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA - PD) berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 s/d 2021, jumlah biaya/dana yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut ::

Tabel. T-C.27

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU 2016 – 2021

| TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | SASARAN | PRGORAM Dan KEGIATAN | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran Program (Out Came) dan Kegiatan (Out Put) | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN | | | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir Priode Renstra | | |
|---|---|---|---|--|--------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------------------------------|--------------|------|
| | | | | | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | | | |
| | | | | | | T | Rp.jt | T | Rp jt | T | Rp jt | T | Rp jt | T | Rp jt | T | Rp jt | | | T |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | |
| Terwujudnya Ketahanan Pangan di daerah | Tingkat kecukupan konsumsi pangan berragam, bergizi, seimbang dan aman ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH)sebar 85% di Tahun 2021 | Meningkatnya Kethanan pangan di daeah serta mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, periakan dan kehutanan | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Konsumsi | 79% | 80% | 1.500 | 81% | 1.750 | 82% | 2.000 | 83% | 2.500 | 84 % | 3.000 | 85% | 3.100 | 85% | 10750 | |
| Terwujudnya ketersediaan energy dan protein | | 1 Tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Angka Ketersediaan - Energi (kkal/kap/hr) - Protein | 4.400 | - 4.500 | | 4.600 | 1.700 | 1.800 | 1.900 | 4.800 | 2.000 | 4.900 | 2.100 | 5.000 | 2150 | 5.000 | 2150 | 2150 |
| | | | | | 155 | 190 | | 190 | | | | 190 | | 200 | | 210 | | 220 | | |

| | | | | (gram/kap/hr) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|---|---|----------|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|-----------|-----|
| | | 2 | Penguatan Cadangan pangan daerah | | Pesentase Cadangan Pangan Daerah | 55% | 58% | 140 | 63% | 150 | 68% | 160 | 73% | 170 | 78% | 180 | 83% | 200 | 90% | 850 | |
| | | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ketersediaan kecukupan energy dan protein | 1 | Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) | Jumlah jenis bahan pangan yang dihitung angka ketersediaan energy dan protein | 9 pokpan | 9 pokpan | 60 | 9 pokpan | 60 | 9 pokpan | 65 | 9 pokpan | 70 | 9 pokpan | 75 | 9 pokpan | 80 | 45 pokpan | 350 |
| | | | Tersedianya data pelopor di bidang pembangunan ketahanan pangan | 2 | Pembinaan Keberhasilan Ketahanan Pangan | Jumlah peserta calon penerima penghargaan Adikarya pangan Nusantara (APN) Tingkat provinsi/nasional | 1 poktan | 1 poktan | 50 | 1 poktan | 50 | 1 poktan | 55 | 1 poktan | 60 | 1 poktan | 65 | 1 poktan | 70 | 5 poktan | 300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
| | Terbentuknya dewan ketahanan pangan kabupaten | | 3 | Rapat Kerja Dewan Ketahanan Pangan | Jumlah Rakor DKP yang dilaksanakan | 2 rakor | 2 rakor | 50 | 2 rakor | 50 | 2 rakor | 55 | 2 rakor | 60 | 2 rakor | 65 | 2 rakor | 70 | 2 rakor | 300 |
| | Tersedianya cadangan pangan daerah | | 4 | Pengembangan Cadangan Pangan Daerah | Jumlah tonase cadangan pangan daerah berbentuk beras | 61 ton | 2 ton | 100 | 3 ton | 100 | 4 ton | 125 | 5 ton | 150 | 6 ton | 175 | 7 ton | 200 | 86 ton | 750 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|-----|------------------------------|------|
| | Tersedianya cadangan pangan masyarakat | | 5 | Monitoring Lumbung Pangan Masyarakat | Jumlah kelompok kelembagaan pangan masyarakat yang memiliki stok cadangan pangan lebih dari 1 ton gabah | - | 2 poktan | 100 | 3 poktan | 50 | 4 poktan | 55 | 5 poktan | 60 | 3 poktan | 200 | 4 poktan | 250 | 25 poktan | 215 |
| | | | 6 | Pembinaan dan pemberdayaan Kelembagaan Pangan Masyarakat | Jumlah kelompok kelembagaan pangan masyarakat yang memiliki stok cadangan pangan lebih dari 1 ton gabah | - | 2 poktan | 100 | 3 poktan | 50 | 4 poktan | 55 | 5 poktan | 60 | 3 poktan | 200 | 4 poktan | 250 | 9 poktan | 650 |
| | Terjaminnya pemasaran hasil produk pertanian | | 7 | Pendampingan Usaha Pengembangan Pangan Masyarakat | Jumlah kelompok Tani penerima bantuan pengembangan usaha pangan masyarakat | - | 5 poktan | 120 | 5 poktan | 125 | 6 poktan | 130 | 7 poktan | 135 | 8 poktan | 140 | 10 poktan | 150 | 31 poktan | 680 |
| | Terwujudnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan | | 8 | Pemantauan dan Analisis Akses Pangan dan Stabilitas Harga Pangan Pokok | Jumlah komidi pangan yang dipantu situasi pasokan, akses dan harga pangan dilokasi pasar | 12 komoditi pangan /10 pasar | 12 komoditi pangan /10 pasar | 150 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 150 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 175 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 200 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 225 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 250 | 12 komoditi pangan /10 pasar | 1000 |
| | Terdeteksinya daerah rentan/rawan pangan tingkat kecamatan | | 9 | Penanganan Daerah Rawan Pangan | Jumlah ibu hamil/balita yang menerima bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) di daerah rentan/rawan pangan | 20 bumil | 20 bumil | 150 | 20 bumil | 150 | 20 bumil | 175 | 20 bumil | 200 | 20 bumil | 225 | 20 bumil | 250 | 120 bumil | 750 |
| | Tersedianya data ketersediaan pemanfaatan pangan dan akses pangan | | 10 | Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi | Jumlah laporan situasi daerah rawan/rentan pangan tingkat kabupaten | 1 dokumen | 1 dokumen | 80 | 1 dokumen | 80 | 1 dokumen | 90 | 1 dokumen | 100 | 1 dokumen | 110 | 1 dokumen | 120 | 6 dokumen | 500 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--|--|---|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Terwujudnya penganekarag aman konsusi pangan | 1 Meningkatkan penganekarag aman konsumsi pangan | | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Angka kecukupan : - Konsumsi energy - Konsumsi protein | 2.135 52 | 2.140 53 | 1.900 | 2.145 54 | 2.150 55 | 2.155 56 | 2.160 57 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 | 2.165 58 |
| | 2 Terwujudnya Pembinaan dan Pengawasan keamanan pangan | | | Persentase sampel pangan segar yang aman dikonsumsi | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% |
| | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terwujudnya peanekaragaman konsumsi pangan | | | 1 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan | Jumlah kelompok pangan yang dikonsumsi dalam kkal/gram/kap/hari | 9 pokpan | 9 pokpan | 100 | 9 pokpan | 100 | 9 pokpan | 100 | 9 pokpan | 125 | 9 pokpan | 150 | 9 pokpan | 175 | 45 pokpan | 650 |
| Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan pangan | | | 2 Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Pengembangan | Jumlah lahan pekarangan pangan buah dan sayuran yang dikelola oleh keompok wanita tani | pekarangan pangan | 20 p pang | 225 | 15 p pangan | 225 | 15 p pang | 250 | 15 p pangan | 275 | 10 p. pangan | 1000 | 12 P pang | 1200 | 120 lahan | 1375 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|--|---|---|---|---|--|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--------------|-----|
| Meningkatkan nya kualitas pelayanan administrasi perkantoran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Cakupan layanan administrasi perkantoran | 100% | 100% | 350 | 100% | 375 | 100% | 405 | 100% | 435 | 100% | 400 | 100% | 450 | 100% | 2380 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Penyediaan Jasa Koomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 bln | 12 bln | 100 | 12 bln | 110 | 12 bln | 115 | 12 bln | 120 | 12 bln | 125 | 12 bln | 130 | 60 bln | 685 |
| | | | 2 | Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis alat tulis kantor, barang cetakan dan pengandaan | 37 jenis barang | 37 jsb | 80 | 37 jsb | 85 | 37 jsb | 90 | 37 jsb | 95 | 37 jsb | 100 | 37 jsb | 105 | 185 jsb | 555 |
| | | | 3 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan- undangan | Jumlah surat kabar yang disediakan | 456 eksplar | 456 ekspl ar | 50 | 456 ekspl ar | 50 | 456 ekspl ar | 55 | 456 ekspl ar | 60 | 456 ekspl ar | 65 | 456 ekspl ar | 70 | 2736 ekps | 300 |
| | | | 4 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman bagi pegawai | 480 orang | 480 orang | 45 | 480 org | 45 | 480 org | 50 | 480 org | 55 | 480 org | 60 | 480 org | 65 | 2400 org | 275 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | | | 5 | Rapat-Rapat Koordinasi/ Konsultasi/Kunjungan ke Dalam Daerah dan Luar Daerah | Jumlah rapat-rapat koordinasi yang diikuti dan konsultasi /kunjungan ke dalam dan luar daerah | 69 kali | 71 kali | 100 | 80 kali | 100 | 85 kali | 110 | 90 kali | 120 | 95 kali | 125 | 100 kali | 130 | 450 kali | 585 |
|--|--|--|---|--|---|---------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|-----|----------|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---------|-----|---|---|---------|-----|---|---|---|---|---------|-----|----------|-----|
| | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Cakupan Layanan kapasitas sumberdaya aparatur | - | 80 Stel | 150 | - | - | 80 Stel | 175 | - | - | - | - | 80 Stel | 200 | 240 stel | 425 |
| | | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Pakian Dunas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian diinas | - | 80 Stel | 150 | - | - | 80 Stel | 175 | - | - | - | - | 80 Stel | 200 | 240 stel | 425 |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja.

Pada bab ini dijabarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2016-2021 terkait dengan bidang ketahanan pangan yaitu skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan dan skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel. T-C.28

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TAHUN 2016 – 2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Kondisi Awal 2015 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Mewujudkan ketahanan di daerah | Meningkatnya ketahanan di daerah serta mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | Persentase Skor pola pangan harapan (PPH tingkat konsumsi | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 85% |

Tabel. T-C.29

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2016 – 2021

| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | Kondisi Awal 2015 | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | | Kondisi Akhir RPJMD |
|--------------------------------|---|---|-------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Mewujudkan ketahanan di daerah | Meningkatnya ketahanan di daerah serta mengoptimalkan peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan | Persentase Skor pola pangan harapan (PPH tingkat konsumsi | 79% | 80% | 81% | 82% | 83% | 84% | 85% | 85% |

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu Tahun 2016 – 2021, merupakan pedoman bagi para pengelola dan penyelenggara kegiatan peningkatan ketahanan pangan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis ini juga akan memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan ketahanan pangan

Dengan melaksanakan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Daerah, karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Renstra ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Rencana strategis ini akan berhasil guna dan berdaya guna dilaksanakan apabila mendapat perhatian dan dukungan dari seluruh aparat DKP dan pihak terkait, baik unsur pemerintah maupun dari masyarakat tani – nelayan dan pelaku agribisnis lainnya.

Semoga rencana strategis ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, demi pembangunan ketahanan pangan di kabupaten Indramayu.

Indramayu, 2016

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Indramayu



H. WARJO SHIMM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590513 1982211 001

